

**PENGARUH BUDAYA BERORIENTASI HASIL TERHADAP KINERJA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

SARIYANAH

2018/18043008

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BUDAYA BERORIENTASI HASIL TERHADAP KINERJA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

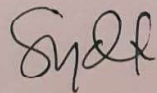
Nama : Sariyanah
NIM : 18043008
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE.,M.Si, AK, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001



Sany Dwita, SE.,M.Si, AK, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

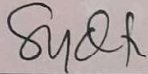

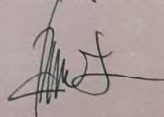
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Budaya Berorientasi Hasil terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Intervening (*Studi Empiris pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur*)
Nama : Sariyanah
NIM/TM : 18043008/2018
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Sany Dwita, SE.,M.Si, AK, Ph.D	
2	Anggota	: Herlina Helmy, SE, M.Sc	
3	Anggota	: Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sariyanah
NIM/TM : 18043008/2018
Tempat, Tgl.Lahir : Nipah Panjang, 28 Desember 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
No. HP : 082273738163
Judul Skripsi : Pengaruh Budaya Berorientasi Hasil terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Intervening (*Studi Empiris pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di tulis atau di publikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengaran dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juni 2023
Yang menyatakan



Sariyanah

ABSTRAK

Sariyanah. 18043008/2018. “Pengaruh Budaya Berorientasi Hasil terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pembimbing : Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran mediasi akuntabilitas keuangan dalam hubungan antara budaya berorientasi hasil dan kinerja organisasi sektor publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Model penelitian dan hipotesis diuji menggunakan SmartPLS4 dengan 130 sampel survei dari pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya berorientasi hasil memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi, dan akuntabilitas keuangan memainkan peran mediasi dalam hubungan antara budaya berorientasi hasil dan kinerja organisasi sektor publik di OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia dalam lingkup organisasi sektor publik negara berkembang dan memberikan beberapa kontribusi. Pertama, mengisi kekosongan literatur dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh budaya berorientasi hasil terhadap kinerja organisasi sektor publik melalui akuntabilitas keuangan, terkhusus di Indonesia. Kedua, mendukung teori NPM dalam mengonfirmasi pengaruh positif budaya berorientasi hasil terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi sektor publik. Ruang lingkup penelitian masih terbatas, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan. Selain itu, pengumpulan data menggunakan survei memungkinkan adanya faktor kejujuran dari responden yang dapat memengaruhi kualitas data. Penelitian selanjutnya bisa memperluas sampel penelitian dan menambahkan metode wawancara. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi organisasi sektor publik terutama bagi OPD Kabupaten Tanjabtim yang ingin meningkatkan kinerjanya melalui penerapan budaya berorientasi hasil dan akuntabilitas keuangan yang efektif.

Kata Kunci: Budaya Berorientasi Hasil, Akuntabilitas Keuangan, Kinerja Organisasi, Organisasi Sektor Publik, New Public Management (NPM), Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Budaya Berorientasi Hasil terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil dari banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D yang sudah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan kepada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Ibu Herlina Herlina Helmy, SE, M.Sc dan Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji ujian skripsi.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Jurusan Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Keluarga besar penulis, terutama Ibunda tercinta, Ibu Isyatun. Terimakasih telah sabar dan tulus menyayangi penulis dari kecil hingga saat ini, tak terkecuali untuk tiga saudara penulis yaitu Ayuk Lastri, Kak Romi dan Adek Setiawan, yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

5. Bapak Agus selaku Ayah dan Irwan Andika selaku suami penulis yang telah menjadi alasan untuk penulis tetap semangat dalam berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini hingga mendapat gelar sarjana.
6. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah ikut andil dalam aktivitas perkuliahan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak di balas dengan kebaikan oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Namun, Penulis berharap penelitian ini masih dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembacanya.

Padang, 22 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori New Public Management (NPM).....	13
2. Kinerja Organisasi Sektor Publik.....	14
3. Akuntabilitas Keuangan.....	17
4. Budaya Berorientasi Hasil.....	18
B. Penelitian yang Relevan.....	20
C. Hubungan antar Variabel dan Penurunan Hipotesis.....	22
D. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
1. Variabel Dependen (Y).....	45

2. Variabel Independen (X)	45
3. Variabel Intervening (Z).....	45
G. Metode Analisis Data	46
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
2. Analisis Statistik Inferensial.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Deskripsi Responden	53
2. Common Method Bias.....	54
3. Deskripsi Variabel Penelitian	55
C. Hasil Analisis Data	56
1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
2. Model Struktural (Inner Model)	61
D. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	74
C. Saran	75
D. Implikasi Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kisi-kisi instrumen penelitian	44
Tabel 4.1 Tingkat pengembalian kuesioner	52
Tabel 4.2 Karakteristik responden	53
Tabel 4.3 Hasil uji harman's single factor	55
Tabel 4.4 Hasil statistik deskriptif	56
Tabel 4.5 Output outer loadings	58
Tabel 4.6 Hasil analisis average variance extracted (AVE)	59
Tabel 4.7 Output cross loading	60
Tabel 4.8 Hasil analisis composite reability dan cronbach alpha	61
Tabel 4.9 Hasil analisis <i>R-square</i>	62
Tabel 4.10 Hasil analisis inner model	63
Tabel 4.11 Hasil perhitungan koefisien variabel tidak langsung	65
Tabel 4.12 Pengaruh total	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual	26
Gambar 2 Model hubungan variabel.....	50
Gambar 3 Hasil analisis outer model dengan SmartPLS	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan layanan guna meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan warganya (Rumere dkk., 2022; Thi Tran dkk., 2020). Dalam menjalankan fungsinya, organisasi sektor publik didanai terutama melalui anggaran negara, untuk alasan ini mereka bertanggung jawab kepada publik atas kegiatannya (Tran dkk., 2020). Institusi pemerintah, partai politik, sekolah dan rumah sakit merupakan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2010).

Organisasi sektor publik memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat, hal ini dibuktikan dari luasnya cakupan wilayah kerja sektor publik dari kota besar hingga ke sudut desa terpencil (Fitriyani, 2014). Namun, kritikan keras terhadap organisasi sektor publik mulai bermunculan, seperti rendah kualitas, selalu rugi, tidak produktif, dan tidak efisien (Antwi dkk., 2008; Satriawan, 2018; Supriyanto, 2016; Suryani dkk., 2020). Sektor publik dipandang terlalu berlebihan dengan sumber daya yang terbatas dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan banyak fungsinya secara efisien dan efektif (Nyamori dkk., 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sektor publik dinilai buruk dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Antwi dkk., 2008; Chikwawawa, 2019; Rohayatin dkk., 2017). Menurut Van de Ven dan Ferry, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan

strategis (Van de Ven dan Ferry, 1980 dalam Munawaroh, 2018). Dalam konteks organisasi sektor publik, kinerja didefinisikan sebagai suatu ukuran pencapaian atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu kegiatan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Kurniawan, 2011).

Kinerja sektor publik yang berhasil adalah kinerja yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas layanan, peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, dan akses yang adil terhadap layanan (Moore, 1995 dalam Verreyne, 2011). Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa kinerja sektor publik belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari survei sosial ekonomi nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, yang menunjukkan hanya 21,9% penduduk Indonesia yang merayakan kesejahteraan ekonomi (Media Indonesia, 2021).

Lebih lanjut, berdasarkan survei kepatuhan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2019 menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan rendah. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki standar pelayanan publik yang baik. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu memenuhi standar pelayanan publik dengan melengkapi informasi biaya, prosedur, jangka waktu dan kepastian hukum investasi (Ombudsman, 2019).

Fenomena yang berkaitan dengan kinerja sektor publik juga dapat dilihat dari banyaknya keluhan akan pelayanan publik yang diberitakan di media massa seperti jalan dan jembatan yang bertahun-tahun rusak, sekolah rusak, pungli dan

warga miskin yang tidak mendapatkan raskin menjadi salah satu indikator nyata rendahnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (Ombudsman, 2017). Fadhil Hasan, seorang Ekonom Indef (*Institute For Development of Economics and Finance*) menyatakan bahwa gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Liputan6, 2015).

Fenomena lain yang berkaitan dengan kinerja sektor publik yang terjadi di organisasi pemerintah, yaitu inefisiensi. Kementerian PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) mencatat inefisiensi anggaran di kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2015-2016 sebesar Rp 392,87 triliun. Yusuf Ateh, seorang Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, menyatakan bahwa penyebab utama inefisiensi ini dikarenakan banyaknya program yang tidak sesuai dengan sasaran, dan 50% program-program lembaga tersebut tidak sesuai dengan sasaran (Tempo, 2018).

Terungkapnya beberapa kasus diatas dapat menyebabkan menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik (Jauhari, 2016). Untuk itu, kinerja organisasi sektor publik terutama organisasi pemerintah saat ini merupakan hal yang layak dibahas, karena pemerintah dituntut dan seharusnya memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Namun, pada saat ini kinerja organisasi pemerintah masih jauh dari apa yang diharapkan (Rohayatin dkk.,

2017; Sedarmayanti, 2007 dalam Rumere dkk., 2022). Berkaitan dengan hal ini, *New Public Management* (NPM) muncul sebagai alternatif dari kinerja sektor publik yang kurang baik (Common, 1998 dan Minogue, 1998 dalam Elias, 2006; Satriawan, 2018). Penerapan NPM telah membawa dampak perubahan terhadap kinerja (Sudarmanto dkk., 2020), dan memengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik hampir diseluruh dunia (Akbar, 2015). Beberapa Negara Barat (seperti Selandia Baru, Australia, Inggris) dan negara-negara Asia (seperti Thailand, Filipina, Korea, Laos, Cina, Mongolia, Vietnam, Malaysia dan Indonesia) telah menerapkan NPM, hal ini dilakukan dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi sektor publik (Hoque, 2005; Pina dan Torres, 2003; Pollit, 2001; Steane dan Carroll, 2001; Parker dan Bradley, 2000; Parker dan Gould, 1999; Mathiasen, 1999; Broadbent dan Guthrie, 1992 dalam Prabowo dkk., 2017).

NPM merupakan teori manajemen publik yang berasumsi bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi sejumlah praktik dan teknik manajemen dari sektor swasta (Hughes, 1998 dalam Mahmudi, 2003). Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan perubahan budaya di sektor publik (Alamsyah, 2016; Nitzl dkk., 2019; Thi Tran dkk., 2020). Budaya baru yang berorientasi pada hasil harus menggantikan budaya tradisional dan konservatif yang hanya mementingkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur (Thi Tran dkk., 2020). Budaya tradisional yang hanya berfokus pada prosedur dan proses daripada hasil akan membuat penggunaan sumberdaya publik

menjadi sia-sia (Sudarmanto., dkk 2020). Implikasi dari teori ini adalah untuk memperoleh kinerja organisasi yang baik maka organisasi tersebut harus menerapkan budaya yang berorientasi pada hasil. Dengan adanya budaya yang berorientasi pada hasil akan membuat setiap anggota organisasi lebih berkomitmen dan bertekad untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi mencapai hasil dan kinerja yang diinginkan (Thi Tran dkk., 2020).

Menurut doktrin NPM, budaya berorientasi hasil dan akuntabilitas memiliki keterkaitan, dimana organisasi sektor publik yang ingin meningkatkan hasil harus mengadopsi budaya berorientasi hasil yang akan mendorong organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai (Nitzl dkk., 2019). Ketika organisasi sektor publik berusaha untuk mempertanggung jawabkan hasil, mereka akan membuat upaya yang lebih besar untuk meningkatkan operasi untuk mencapai tujuan. Secara khusus, ketika organisasi sektor publik berhasil menerapkan akuntabilitas keuangan, mereka menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif dan pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi (Barth, 2015).

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang menjadi sorotan utama masyarakat karena berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan dana publik (Zeyn, 2011). Secara khusus, akuntabilitas keuangan mengharuskan organisasi sektor publik membuat laporan keuangan sebagai evaluasi akuntabilitas dan pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan (Mack dan Ryan, 2006; Romzek dan Dubnick, 1978). Dalam hal ini, sebagai alat akuntabilitas, laporan keuangan memainkan peran penting dalam

menilai akuntabilitas dan memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan (Patton, 1992). Oleh karena itu, penerapan akuntansi akrual telah menjadi populer di banyak negara di dunia (Eng dkk., 2019). Akuntansi akrual adalah salah satu sistem informasi yang diterima secara umum yang memberikan gambaran lengkap dan dapat diandalkan tentang posisi keuangan dan ekonomi serta kinerja pemerintah (Lyrio dkk., 2018). Penerapan akuntansi akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas keuangan (Barth, 2015). Selain itu, organisasi sektor publik yang berusaha meningkatkan akuntabilitas keuangannya memerlukan perubahan budaya organisasi yang berakar pada perubahan proses berfikir para pemimpin organisasi tersebut (Thi Tran dkk., 2020).

Budaya organisasi adalah konsep yang luas, terdiri dari dimensi yang berbeda (Tobias dkk., 2009). Untuk itu, Tran dkk., (2020) menyarankan untuk meneliti lebih lanjut terkait dampak budaya secara umum dan budaya berorientasi kinerja atau hasil. Budaya berorientasi hasil adalah salah satu bagian dari budaya organisasi (Rizzi dkk., 2018). Disektor publik, budaya berorientasi hasil dipandang sebagai budaya yang menekankan pada akuntabilitas, komitmen terhadap organisasi, dan pengakuan atas pencapaian individu. Organisasi sektor publik yang menerapkan budaya berorientasi hasil akan menekan manajer dan memotivasi karyawan untuk bekerja secara efisien, dan pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, dalam organisasi sektor publik dengan budaya berorientasi hasil, manajer senior membuat komitmen yang kuat

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas hasil mereka (Verbeeten dan Speklé, 2015).

Menurut OECD, budaya berorientasi hasil merupakan langkah pertama menuju peningkatan kinerja dalam organisasi sektor publik (Verbeeten dan Speklé, 2015). Pemerintah dengan budaya berorientasi hasil dianggap sebagai kinerja yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih baik, dan transparansi yang lebih baik (Ouda, 2015 dalam Thi Tran dkk., 2020). Budaya organisasi adalah variabel yang sangat relevan untuk di pertimbangkan, terutama mengingat perubahan budaya yang signifikan yang telah memengaruhi sektor publik dengan munculnya gerakan NPM, yang menjanjikan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik (Ashworth, 2012 dalam Nitzl dkk., 2019).

Christensen dan Lægreid (2015) melakukan penelitian tentang kinerja dengan menggunakan diskusi teoritis dan penilaian empiris tentang hubungan antara kinerja dengan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik dengan fokus pada reformasi administrasi. Hasil temuannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan akuntabilitas dan kinerja. Selain itu, temuannya juga menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan kinerja masih diperdebatkan.

Tran dkk., (2020) juga melakukan penelitian yang menguji kinerja dengan menggunakan akuntabilitas dalam menentukan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi publik dalam konteks Vietnam. Dengan menggunakan pendekatan survei, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan informasi pelaporan keuangan menjamin kualitas di sektor publik dan berguna untuk meningkatkan kinerja, serta akuntabilitas memiliki peran mediasi

pada hubungan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil Christensen dan Lægheid (2015). Hasil temuan Tran dkk., (2020) diperkuat dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Thi Tran dkk., (2020), yang menguji kinerja dengan budaya berorientasi hasil dengan menggunakan akuntabilitas keuangan sebagai variabel mediasi dalam konteks negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya berorientasi hasil memiliki dampak positif pada kinerja organisasi, dan akuntabilitas keuangan memainkan peran mediasi dalam hubungan antara budaya berorientasi hasil dan kinerja organisasi.

Verbeeten dan Speklé (2015) melakukan penelitian di negara maju dengan menggunakan survei manajer keuangan di 96 kota di Belanda. Temuannya menunjukkan bahwa budaya yang berorientasi pada hasil berhubungan positif dengan kinerja. Rizzi dkk., (2018) menguji hipotesis bahwa beberapa dimensi budaya organisasi adalah prediktor kuat dari kinerja energi manajerial dan teknis yang dirasakan. Data dari 729 tanggapan kuesioner dari manajer energi kota Italia menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja.

Chau dkk., (2021) melakukan penelitian di Vietnam dengan menguji budaya berorientasi hasil terhadap kinerja dengan menggunakan informasi kinerja sebagai variabel mediasi. Hasil temuan memperkuat teori NPM, dimana kunci untuk meningkatkan kinerja sektor publik adalah pembentukan budaya berorientasi hasil, bukan hanya berfokus pada pengendalian input sebagai budaya birokrasi tradisional yang sudah ada di masyarakat.

Sari (2016) menguji pengaruh akuntabilitas, faktor organisasional dan penggunaan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi di perguruan tinggi. Hasil temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas serta persepsi tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perguruan tinggi. Pratiwi dan Akbar (2018) dengan menggunakan metode survei dan wawancara menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik. Ramdhani (2018) dan Munawaroh (2018) juga melakukan penelitian dengan menguji kinerja organisasi sektor publik dalam konteks Indonesia dengan menggunakan variabel budaya organisasi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan bahwa budaya organisasi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Meskipun penelitian mengenai pengaruh budaya berorientasi hasil pada kinerja di organisasi sektor publik telah dipelajari di seluruh dunia (misalnya, Nitzl dkk., 2019; Rizzi dkk., 2018; Verbeeten dan Speklé, 2015). Namun, penelitian mengenai pengaruh langsung budaya berorientasi hasil pada akuntabilitas keuangan dan pengaruh tidak langsung budaya berorientasi hasil terhadap kinerja melalui akuntabilitas keuangan hampir tidak disebutkan dalam penelitian sebelumnya (Thi Tran dkk., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Indonesia telah melakukan penelitian mengenai kinerja dengan menggunakan variabel budaya organisasi. Namun, sebagian penelitian berfokus pada pengaruh budaya secara umum. Penelitian mengenai kinerja organisasi sektor publik di Negara berkembang dengan menggunakan variabel budaya berorientasi hasil baru ditemukan dalam

konteks Vietnam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Thi Tran dkk., (2020) dan Chau dkk., (2021).

Penelitian ini akan dilakukan dalam konteks Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang sudah menerapkan *New Public Management* (NPM), sama seperti Vietnam. Meskipun sama-sama negara berkembang tetapi Indonesia dan Vietnam memiliki sistem politik dan ekonomi yang berbeda, dan hasil penerapan NPM di kedua negara tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Selain itu, belum ditemukan penelitian di Indonesia yang meneliti mengenai pengaruh budaya berorientasi hasil melalui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Nyamori dkk., (2017) juga menyatakan bahwa penerapan NPM di negara berkembang dengan lembaga pemerintah yang tidak efektif dan kerangka peraturan yang lemah akan membuat penggunaan alat akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas tidak mungkin berhasil, karena setiap sistem yang diterapkan harus sesuai dengan lingkungan nasional dimana ia beroperasi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang berdaulat dan bernaung di bawah pemerintah Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan di Kabupaten Tanjabtim mengingat kabupaten ini termasuk ke dalam daerah paling luas di Provinsi Jambi dan Realisasi PAD tahun 2021 mencapai 146,09% (Anggaran 55,858,703,734.21 dan Realisasi 81,601,471,901.75), seharusnya PAD yang tinggi dan reformasi NPM yang telah diterapkan sejak diterapkannya otonomi daerah dapat membantu meningkatkan dan menciptakan kinerja

pemerintahan yang lebih baik lagi. Namun, berdasarkan fenomena yang ada menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Tanjabtim belum sepenuhnya berhasil, hal ini dilihat dari masih banyaknya keluhan akan pelayanan publik yang diberitakan dimedia massa. Selanjutnya, hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2021 juga menunjukkan bahwa Kab.Tanjabtim memperoleh predikat yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu predikat CC. Artinya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih harus meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerjanya. Selain itu, penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu juga belum ada yang melakukan penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga menjadikan Kab.Tanjabtim sebagai penelitian pertama yang membahas mengenai variabel yang digunakan untuk penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan judul **“Pengaruh Budaya Berorientasi Hasil terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Intervening”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya berorientasi hasil memiliki dampak positif terhadap kinerja?
2. Apakah budaya berorientasi hasil memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas keuangan?
3. Apakah akuntabilitas keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja?

4. Apakah akuntabilitas keuangan memediasi hubungan antara budaya berorientasi hasil dan kinerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif budaya berorientasi hasil terhadap kinerja.
2. Pengaruh positif budaya berorientasi hasil terhadap akuntabilitas keuangan.
3. Pengaruh positif akuntabilitas keuangan terhadap kinerja.
4. Akuntabilitas keuangan memediasi hubungan antara budaya berorientasi hasil dan kinerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh budaya berorientasi hasil terhadap kinerja organisasi sektor publik dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi sektor publik yang ingin meningkatkan kinerja organisasinya melalui budaya organisasi dan akuntabilitas.